

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR, DAN PROPOSISI

2.1 Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan kajian mengenai teori kepustakaan yang menjelaskan tentang penelitian agar mendukung beberapa perumusan masalah untuk landasan yang akan dipakai. Selanjutnya dengan implementasi yang berkaitan dengan fokus penelitian ini menggunakan kajian penelitian terdahulu sebagai perbandingan dan sebagai referensi peneliti dalam melaksanakan penelitian terkait implementasi kebijakan publik serta mengambil tiga bagian yaitu *Grand Theory*, *Middle Theory*, dan *Applied Theory* dalam penelitian ini.

2.1.1 Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu merupakan pengupayaan dari peneliti untuk membandingkan dan memberikan gambaran pengetahuan yang memberikan dasar penelitian, selain itu kajian penelitian terdahulu membantu peneliti agar dapat memposisikan penelitian dan menunjukkan keaslian penelitian yang akan diteliti. Pada penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung” sehingga Kajian

penelitian terdahulu memberikan sebuah fungsi sebagai faktor pendukung dalam melakukan penelitian. berikut ini merupakan beberapa perbandingan dan menjadi gambaran bagi peneliti dalam sebuah penelitian yang telah dikemukakan oleh peneliti terdahulu sebagai acuan untuk peneliti. Pada penelitian ini mengacu tiga kajian penelitian yang terdahulu berkaitan dengan variabel Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik, di antaranya penelitian dari : **Siti Zubaidah (2021), Henri Ihsan Anugrah (2020), Wahyu Kurnia sari, Ertien R. Nawangsari (2019).**

Tabel 2. 1 Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan			
			Teori yang digunakan	Pendekatan	Metode	Teknik Analisis
1.	Siti Zubaidah (Jurnal), 2021	Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Kepada Masyarakat Di Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang	Edward III	Kualitatif	Deskriptif	Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi

Sumber : penelitian Siti Zubaidah yang dimodifikasi oleh peneliti tahun 2023

1. Penelitian pertama yang dilakukan oleh **Siti Zubaidah (2021)** dengan judul **“Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Kepada Masyarakat Di Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang”** penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data Observasi, wawancara, dokumentasi, dan analisis data kondensasi data (*resuction data*), penyajian data, verifikasi data. Penelitian ini menggunakan penguatan atau variabel yaitu implementasi kebijakan serta menggunakan teori **Edward III**. Dalam pembahasannya kebijakan keterbukaan informasi publik sudah dikatakan baik dalam pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik, akan tetapi sumber daya manusia, komunikasi antar unit dan masyarakat di Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang belum maksimal sehingga kebijakan KIP tidak berjalan dengan baik.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif serta teknik analisis data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi lalu penggunaan teori Implementasi Kebijakan oleh **Edward III**.

Ada pula perbedaan dalam penelitian ini yaitu mengenai lokus penelitian kali ini dilakukan di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung.

Tabel 2. 2 Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan			
			Teori yang digunakan	Pendekatan	Metode	Teknik Analisis
2.	Henri Ihsan Anugrah (Jurnal), 2020	Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Pada Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung	Grindle	Kualitatif (<i>post positive</i>)	Deskriptif <i>Purposive Sampling</i>	Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi

Sumber : penelitian Henri Ihsan Anugrah yang dimodifikasi oleh peneliti tahun 2023

2. Penelitian yang kedua dilakukan oleh **Henri Ihsan Anugrah (2020)** dengan judul **“Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Pada Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat”** penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan Kualitatif dengan metode deskriptif (*post-positive*) serta pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi. Lalu menggunakan teori dari **Grindle**. Di dalam pembahasannya, implementasi kebijakan keterbukaan informasi di kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung yaitu mengenai proses mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi di daerah tersebut. Akan tetapi hal ini belum berjalan efektif dikarenakan keterbatasan mempergunakan isi kebijakan dan konteks implementasi sehingga belum terwujudnya keterbukaan informasi publik.

Kesamaan dalam penelitian dalam penguatan atau variabelnya yaitu implementasi kebijakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta proses teknik data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi.

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu mengenai teori yang dipakai pada penelitian ini serta badan publik yang melaksanakan kebijakan keterbukaan informasi publik yaitu pada Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung yang masih belum optimalnya para pelaksana memberikan informasi kepada masyarakat.

Tabel 2. 3 Kajian Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan			
			Teori yang digunakan	Pendekatan	Metode	Teknik Analisis
3.	Wahyu Kurnia sari, Ertien R. Nawangsari (Jurnal), 2019	Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Sebagai Upaya Mewujudkan <i>Good Governance</i>	Edward III	Kualitatif	Deskriptif	Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi

Sumber : penelitian Wahyu Kurnia sari, Ertien R. Nawangsari yang dimodifikasi oleh peneliti tahun 2023

3. Penelitian yang ketiga dilakukan oleh **Wahyu Kurnia Sari dan Ertien R. Nawangsari (2019)** dengan judul **“Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Sebagai Upaya Mewujudkan *Good Governance*”** penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, pada teknik analisis data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi lalu teori yang digunakan yaitu oleh **Edward III**, serta dalam penguatan atau variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu implementasi kebijakan. Pada pembahasannya penelitian ini meneliti badan publik di Provinsi Jawa Timur yaitu Dinas Kominfo dan Informatika untuk mewujudkan *good governance* dan transparansi dalam memberikan layanan informasi kepada publik. Dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur telah berhasil melaksanakan sebuah kebijakan keterbukaan informasi publik. Keberhasilan ini mengacu pada struktur birokrasi pada dinas tersebut. Sehingga dengan adanya transparansi dapat mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dan hal inilah yang menjadi sebuah pencapaian dalam upaya mewujudkan *good governance*.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penguatan atau variabel tentang implementasi kebijakan KIP, dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode deskriptif. Penggunaan teori serta teknik analisis data yang digunakan pun memiliki kesamaan.

Akan tetapi dalam penelitian ini memiliki perbedaan dalam penelitian ini yaitu mengenai lokus penelitian kali ini dilakukan di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung.

2.1.2 Kajian Terhadap *Grand Theori*

2.1.2.1 Administrasi

Secara etimologi administrasi berasal dari bahasa Latin (Yunani) yang terdiri atas dua kata, yaitu “*ad*” dan “*ministrare*” yang berarti “*to serve*” yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah melayani dan atau memenuhi.

Administrasi dapat dikatakan arti sempit karena berkaitan dengan catat-mencatat, mengetik, dan surat-menyurat. Dengan maksud kebijakan dalam kegiatan yang berhubungan mengenai perihal informasi mulai dari penyusunan hingga sampai penerima informasi yang berbentuk tata usaha. Lalu administrasi dapat dikatakan arti luas karena di dalamnya bersangkutan dengan kerja sama dengan lebih dari satu orang dengan bersama-sama dalam menentukan sebuah perencanaan untuk menggapai suatu tujuan daripada perencanaan yang telah ditetapkan secara berkelompok dengan efektif dan efisien. Agar dapat memberikan sebuah interpretasi mengenai administrasi maka peneliti selalu melibatkan teori dari para pakar administrasi.

Harbani Pasolong (2022:3) berpendapat bahwa Administrasi adalah pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien, dan rasional.

Sedangkan menurut **Sondang P. Siagian dalam Pasolong (2022:3)** mengartikan Administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dari pendapat para ahli yang telah dipaparkan di atas, peneliti dapat menyimpulkan administrasi merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh anggota kelompok ataupun secara individu dalam mencapai sebuah tujuan secara bersama-sama yang berkaitan dengan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh organisasi dalam bentuk kerja sama anggotanya dengan secara terarah dan terkoordinasi dengan pimpinan dalam mencapai sebuah tujuan yang ditetapkan sebelumnya.

Menurut **Simon** yang dikutip oleh **Pasolong** dalam bukunya **“Teori Administrasi Publik” (2019:20)** mengatakan bahwa Administrasi Publik pada hakikatnya menyangkut batas-batas aspek perilaku manusia yang rasional dan yang tidak rasional.

Pendapat ahli di atas menggambarkan bahwa administrasi publik merupakan sebuah serangkaian hubungan antara masyarakat guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

2.1.2.2 Publik

Publik pada dasarnya berasal dari bahasa Inggris "*public*" yang berarti umum, masyarakat umum, orang banyak, dan warga. Akan tetapi kata "publik" diterjemahkan oleh beberapa kalangan berbeda. Misalnya kata "*public administration*" diartikan menjadi "administrasi publik". Maka dari itu, pengertian publik diterapkan sesuai dengan kepentingan masing-masing yang memang berarti "umum", "negara", dan "masyarakat".

Syafi'ie dkk yang dikutip oleh **Pasolong** dalam bukunya "**Teori Dasar Administrasi Publik**" (2022:7) mendefinisikan bahwa Publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki.

Sedangkan menurut **Moore** yang dikutip oleh **Zaenal Mukarom** dan **Laksani** dalam bukunya "**Manajemen Pelayanan Publik**" (2022:17) mendefinisikan Publik adalah sekelompok orang dengan kepentingan yang sama dan memiliki pendapat terhadap isu yang menimbulkan pertentangan atau kontroversial.

Maka dari itu, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa publik merupakan khalayak umum yang mempunyai sebuah kepentingan bersama berdasarkan partisipasi warga negaranya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang menjadikan sesuatu yang paling penting. Sehingga masyarakat secara umum dapat merasakan atas aturan dasar yang telah dibuat.

2.1.2.3 Administrasi Publik

Istilah mengenai Administrasi Publik pada dasarnya memiliki dua unsur kata yaitu Administrasi dan Publik. Setelah apa yang sudah diketahui bahwasanya administrasi merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan organisasi dalam bentuk sebuah kerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Lalu mengenai perihal kata “Publik” itu dapat diartikan “umum”, “negara”, atau “masyarakat”. Konsepsi dasar administrasi publik khususnya di Indonesia pada dasarnya sudah muncul sejak lama, hanya saja para ahli mengganti istilah administrasi publik menjadi administrasi negara.

Nicholas Henry (1998) dalam **Pasolong (2022:9)**

mengatakan bahwa :

“Administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial”.

Sedangkan menurut **Pasolong** dalam bukunya “**Teori Administrasi Publik**” (2022:9) mendefinisikan Administrasi publik adalah kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.

Maka dapat peneliti simpulkan dan garis bawahi bahwasanya administrasi publik merupakan korelasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan roda pemerintahan, administrator atau dapat dikatakan orang yang melakukan administrasi melakukan sebuah tugas mengenai perencanaan, proses, yang ada pada tugas pemerintahan dan tujuan yang terikat dalam masalah hingga kebutuhan umum di masyarakat.

2.1.3 Kajian Terhadap *Middle Theori*

2.1.3.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik ialah hasil interaksi para aktor pembuat kebijakan berdasarkan melihat fenomena yang ada pada lingkungan yang harus menciptakan sebuah solusi di dalamnya. Sehingga kebijakan publik juga harus mengikutsertakan masyarakat guna memberikan sebuah aturan dasar atau kebijakan yang nantinya memberikan keputusan yang terbaik.

Anderson dalam **Agustino (2020:16)** bahwasanya Kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau kelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.

Sedangkan menurut **Agustino** dalam bukunya “**Dasar-Dasar Kebijakan Publik**” (2020:14) mengatakan bahwa :

“Kebijakan publik merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah (entah itu bertujuan untuk menyelesaikan masalah, meningkatkan sumber daya manusia, menghentikan tindakan terorisme, ataupun lainnya) dan kerja tersebut menghasilkan sesuatu (*what difference it makes*)”.

Maka peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya kebijakan publik merupakan keterkaitan terikat dengan kehidupan bermasyarakat dan memiliki kepentingan agar dapat mengendalikan suatu negara sekaligus dalam mengelola suatu negara dalam aturan-aturan yang dibuatnya. Para pembuat kebijakan yang dilakukan oleh

pemerintah ataupun sekelompok organisasi dalam melaksanakan aturan dasar yang menjadi hukum pada masyarakat agar terjadi hubungan sosial yang sejahtera dan dapat diterima oleh masyarakat luas.

2.1.3.2 Proses Pada Kebijakan Publik

Dalam sebuah proses kebijakan publik adalah satu dari sebagian tahap mengenai pembuatan dan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Dengan hal ini, peneliti menyatakan bahwa proses dalam kebijakan yang dimaksud adalah sebuah perjalanan dalam menciptakan serta nantinya melaksanakan suatu kebijakan yang telah dirancang sedemikian rupa hingga nanti pada saatnya waktu untuk pelaksanaan suatu kebijakan itu sendiri.

Menurut **Dunn** yang dikutip oleh **Subarsono** dalam bukunya **“Analisis Kebijakan Publik” (2021:8)** menyatakan bahwa Proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis.

Sedangkan **Michael Howlet** dan **Ramesh** dalam **Syahrudin (2020:22)** menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut :

1. Penyusunan Agenda, yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.
2. Formulasi Kebijakan, yakni proses perumusan pilihan-pilihan oleh pemerintah.

3. Pembuatan Kebijakan, yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tindakan.
4. Implementasi Kebijakan, yakni proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
5. Evaluasi Kebijakan, yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil kinerja kebijakan.

Pada pernyataan ahli di atas bahwasanya proses dalam kebijakan publik itu sendiri perlu melibatkan beberapa alternatif yang dilakukan oleh para aktor dalam memecahkan permasalahan yang nantinya dibuat oleh pembuat kebijakan yang nantinya akan terpilih dari beberapa alternatif sehingga membentuk suatu kebijakan yang nantinya akan mempunyai kekuatan hukum yang dapat dipatuhi oleh khalayak umum. Sehingga di sini peneliti akan mengambil dalam proses kebijakan publik mengenai implementasi kebijakan pada penelitian kali ini.

2.1.4 Kajian Terhadap *Operasional Theori*

2.1.4.1 Implementasi Kebijakan

Pada dasarnya implementasi kebijakan publik itu sendiri merupakan dari serangkaian kegiatan dalam pelaksanaan suatu kebijakan yang menyangkut masalah atau konflik sehingga memperoleh sesuatu dari alternatif dalam proses kebijakan dan mendapatkan suatu hasil dan sasaran yang akan dituju dengan secara maksimal.

Menurut **Jones** dalam **Syahrudin (2020:28)** menyatakan bahwa :

“Implementasi Kebijakan adalah suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah. Namun, pelaksanaannya menuntut adanya syarat antara lain : adanya orang atau pelaksana, uang, dan kemampuan organisasi atau yang sering disebut *resource* (sumber)”.

Sedangkan menurut **Edward III** dan **Sharkansky** dalam **Syahrudin (2020:20)** menyatakan bahwa :

“Kebijakan negara tersebut dapat diterapkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat pemerintah atau program-program atau tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah”.

Hal senada juga menurut **Satibi (2019:7)** mengatakan :

“Implementasi kebijakan publik sangat tergantung kepada kecepatan, kecermatan dan kompetensi aparatur dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Secara empirik, tujuan kebijakan tersebut akan tercapai manakala aparatur memiliki konsen dan komitmen yang tinggi serta konsisten dalam menterjemahkan isi kebijakan tersebut, sehingga *output* kebijakan yang intinya diarahkan pada pelayanan publik benar-benar dapat terwujud”.

Dari kedua pendapat para ahli peneliti dapat menyimpulkan mengenai implementasi kebijakan publik itu sendiri merupakan peran penting di dalam suatu kebijakan publik yang dilakukan oleh aktor dalam pembuat kebijakan. Pemerintah yang memiliki peranan dalam suatu kebijakan publik dalam memecahkan beberapa masalah publik tentunya harus memberikan alternatif yang nantinya keluar suatu kebijakan publik serta diatur ke dalam perundang-undangan.

2.1.4.2 Tahapan Implementasi Kebijakan

Dari teori **Hogwood** dan **Gunn** yang dikutip **Pramono** dalam bukunya **“Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik”** (2020:43) untuk dapat mengimplementasikan kebijakan publik secara sempurna, diharuskan mempunyai tahapan sebagai berikut :

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh pembuat kebijakan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pengimplementasian dari kebijakan yang dirancang.
2. Untuk pelaksanaan Program yaitu tersedianya waktu dan sumber yang cukup memadai.
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia antara pihak yang satu dengan pihak yang lain pada setiap tahapan proses implementasi harus benar-benar dapat disediakan.
4. Kebijakan yang diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kualitas yang profesional.
5. Hubungan kualitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil.
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
10. Pihak-pihak yang memiliki kewenangan kekuasaan dapat menuntut dan mendapat kepatuhan yang sempurna. Dalam artian hal ini jika terjadi sebuah pelanggaran dapat mengambil sebuah tindakan yang sesuai dengan segera.

Dengan hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwasanya sebuah tahapan implementasi kebijakan publik dapat dilakukan dengan secara langsung mengimplementasikan dalam bentuk program dan juga diimplementasikan melalui kebijakan turunan pada suatu kebijakan publik itu sendiri.

2.1.4.3 Model Implementasi Kebijakan Publik

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan pada kebijakan publik itu sendiri ialah dibutuhkannya model implementasi kebijakan, di dalamnya ada yang bersifat abstrak (tidak berbentuk), ada pula yang bersifat operasional (pengukuran suatu variabel). Sehingga semakin jelas masalah maka diperlukan model yang lebih bersifat operasional.

Menurut **George C. Edward III (1980)** dalam **Agustino (2020:154)** menamakan model implementasi kebijakan publik dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Implementation* (dampak langsung dan tidak langsung terhadap implementasi). Dalam pendekatan yang dinyatakannya terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan di antaranya :

1. Komunikasi : variabel ini menentukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.
 - 1) Transmisi, merupakan penyaluran atau penyampaian komunikasi, bila komunikasi terinformasikan atau terlaksana dengan baik akan mendapatkan suatu implementasi kebijakan yang baik pula
 - 2) Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan. Sehingga kejelasan ini guna mencapai tujuan kebijakan yang telah dibuat.
 - 3) Konsistensi, dalam hal ini komunikasi harus konsisten demi menghindari perintah yang berubah-ubah yang nantinya memunculkan kebingungan dan perbedaan pemahaman.

2. Sumber Daya : variabel kedua ini mempengaruhi efektif dan efisien daripada implementasi kebijakan publik. Kekurangan dan tidaknya sumber daya baik personal, kewenangan, keuangan, dan peralatan akan menyulitkan pada sebuah implementasi.
 - 1) Staf, kegagalan yang biasa terlihat dalam implementasi kebijakan disebabkan karena sumber daya manusia yang tidak memadai atau tidak berkompetensi pada bidangnya. Penambahan sumber daya manusia saja tidak cukup, akan tetapi perlu sumber daya manusia para implementor yang terampil dan kompetensi di dalamnya guna melaksanakan implementasi kebijakan.
 - 2) Informasi, yang pertama bagaimana implementor melakukan kebijakan saat diberi perintah, yang kedua informasi terhadap kepatuhan pelaksana terhadap peraturan yang ditetapkan, dalam hal ini para pelaksana kebijakan.
 - 3) Wewenang, kewenangan menentukan bagaimana arah program dilakukan.
 - 4) Fasilitas, merupakan faktor pendukung (sarana dan prasarana) dalam menunjang pelaksanaan tugas dan wewenangnya terkait implementasi kebijakan.
3. Disposisi : variabel ketiga ini jika pelaksana suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi penyimpangan.
 - 1) Efek disposisi, sikap para pelaksana akan menciptakan hambatan dalam implementasi kebijakan jika mereka tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat tinggi. Maka dari itu pelaksana kebijakan haruslah orang yang berdedikasi tinggi dan berorientasi pada kepentingan publik.
 - 2) Melakukan pengaturan birokrasi, mengacu kepada pengangkatan atau pemilihan Staf yang ditunjuk sehingga berkompeten.
 - 3) Insentif, penambahan biaya tertentu akan menjadi faktor pendorong yang membuat implementor kebijakan melaksanakan perintah dengan baik.

4. Struktur Birokrasi : variabel terakhir ini menyangkut kepada kerja sama banyak orang, birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi yang baik.
 - 1) Melakukan *Standart Operating Procedures* (SOP), yaitu suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para implementor untuk melaksanakan kegiatannya sesuai standar atau peraturan regulasi yang ditetapkan.
 - 2) Fragmentasi, upaya dalam penyebaran tanggung jawab kegiatan pegawai di antara beberapa unit kerja. Dengan desentralisasi, implementasi kebijakan lebih efisien melalui organisasi yang berkompeten.

Sehingga untuk melihat dan menilai seberapa berhasilkah implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh badan publik yang ditunjuk sebagai PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), perlu adanya variabel yang berhubungan satu sama lain.

2.1.4.4 Informasi

Dalam sebuah layanan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik, perlu paham dengan apa yang namanya informasi. Yang mana informasi bertujuan dalam memberikan sebuah bahan pengetahuan yang berisikan sebuah kumpulan dari data untuk digabungkan menjadi sebuah informasi.

Menurut **Romney** dalam **Delle, dkk (2020:8)** mendefinisikan bahwa “Informasi merupakan data yang diolah agar dapat mempermudah dalam melakukan pengambilan suatu keputusan”.

Sedangkan menurut **Deni Darmawan** dalam **Delle, dkk (2020:8)** menjelaskan bahwa Informasi yaitu hasil dari pemrosesan data, namun tidak semua hasil proses dapat dikatakan sebagai informasi, data yang tidak memiliki arti, penjelasan atau makna bukan sebuah informasi bagi seseorang.

Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa informasi merupakan sebuah gabungan dari beberapa data yang melalui penahapan untuk disaring dan nantinya menjadi satu kesatuan data sehingga membentuk sebuah informasi yang jelas dan terukur. Kebutuhan informasi sangat diperlukan guna mendapatkan pengetahuan, menjaga sebuah sistem agar tetap *up to date* atau terkini, untuk mengetahui berbagai peraturan, serta membuat keputusan.

2.1.4.5 Keterbukaan Informasi

Keterbukaan informasi publik dikaitkan dengan transparansi dari badan publik kepada masyarakat banyak. Serta keterbukaan informasi merupakan suatu bukti kebebasan masyarakat dalam mencari tahu atau untuk mengetahui layanan informasi yang dikemukakan oleh badan pulik.

Menurut **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008** tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat dalam kepentingan publik.

Keterbukaan informasi publik yang dikemukakan oleh Undang-Undang di atas mempunyai beberapa tujuan yang di antaranya :

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan keputusan publik.
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif, efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan.
5. Mengetahui kebijakan publik yang mempengaruhi kebutuhan hidup orang banyak.
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia di atas tentang keterbukaan informasi publik, tentunya hal ini menguatkan sebagai landasan sebagai dasar peneliti di dalam penelitiannya.

Dalam pelaksanaannya terdapat **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Pasal 12 ayat 1** tentang **Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008** mengenai keterbukaan informasi publik yaitu Pejabat yang ditunjuk sebagai PPID di lingkungan Badan Publik Negara yang berada di pusat dan di daerah merupakan pejabat yang membidangi Informasi Publik.

Dalam hal ini uraian daripada **Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010** tentang pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di mana PPID bertugas dan bertanggung jawab dalam :

1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi.
2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Pelayanan Informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana.
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik
5. Pengujian konsekuensi.
6. Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya.
7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses.
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

Selanjutnya dalam **Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017** berkaitan dengan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008** tentang keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Bupati tersebut dibuat mengenai Perubahan atas **Peraturan Bupati Bandung Nomor 49 Tahun 2014** tentang

Pedoman Pelaksanaan Teknis **Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013** tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung.

Sehingga tujuan dibuatnya aturan **Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017** dalam keterbukaan informasi publik yaitu untuk lebih mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah mengenai layanan publik kepada masyarakat yang berada di Kabupaten Bandung. Pada Peraturan Bupati tersebut tercantum mengenai ketentuan umum bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi publik dilakukan oleh PPID yang ditunjuk sebagai pelaksanaan kebijakan informasi publik.

Maka dari itu, dengan adanya aturan dasar yang memberikan latar belakang mengenai keterbukaan informasi publik ini, sudah sepatutnya masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam memanfaatkan sarana publik. Sehingga masyarakat dapat mengetahui sejauh mana badan publik yang berada di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung melaksanakan kebijakan keterbukaan informasi publik dalam aspek layanan informasi yang diberikan sesuai Undang-Undang yang berlaku yang nantinya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat banyak sesuai dengan harapan.

2.1.4.6 *Good Governance*

Menurut **Mardiasmo** dalam **Reydonnizar Moenek** dan **Suwanda (2019:60)** mendefinisikan :

“*Good Governance* adalah pemerintahan yang baik. Kondisi ini berupaya untuk menciptakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi efisiensi, pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif”.

Sedangkan menurut **LAN** dalam **Sedarmayanti (2003:6)** yang dikutip oleh **Reydonnizar Moenek** dan **Suwanda (2019:62)** menyatakan bahwa *Good Governance* mengandung dua arti yaitu sebagai berikut.

1. Nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak masyarakat dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mencapai tujuan (nasional) kemandirian pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.
2. Aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya mencapai tujuan tersebut.

Maka dapat disimpulkan oleh peneliti mengenai *Good Governance* merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan dengan baik mempengaruhi faktor-faktor di dalamnya guna mencapai tujuan dalam membangun pemerintahan negara menjadi terarah dan bertanggung jawab.

2.2 Kerangka Berpikir

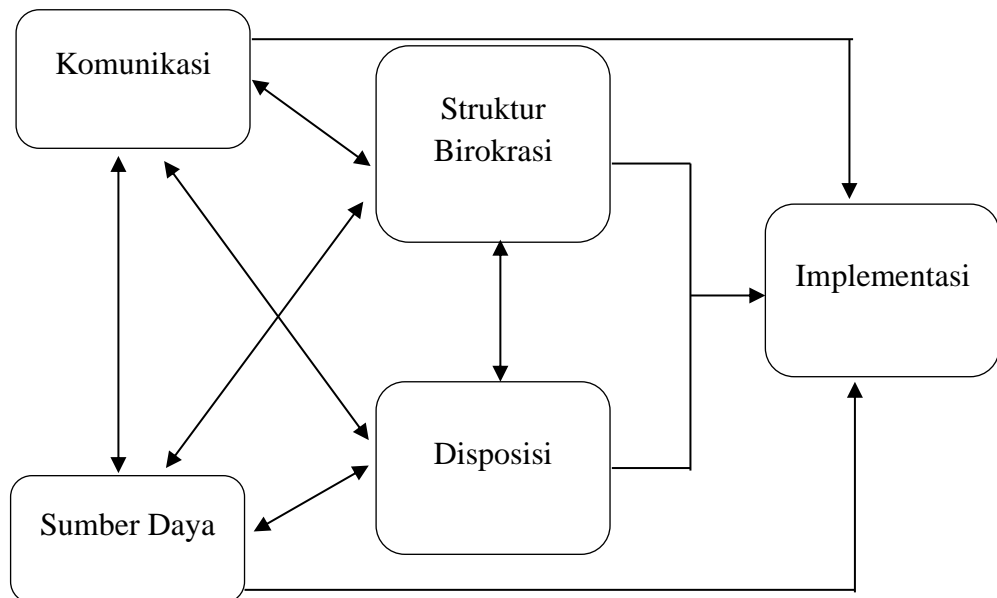
Mengenai kerangka berpikir dapat memaparkan judul dan permasalahan dalam sebuah penelitian yang sedang berlangsung. Kerangka berpikir berdasarkan pendapat dari para ahli, mengenai teori-teori yang saling berhubungan pada sebuah penelitian. Kerangka berpikir yang telah dirancang oleh peneliti dapat memberikan sebuah gambaran secara singkat. Sehingga dengan adanya kerangka berpikir sebagai acuan dan pedoman untuk penelitian atas dasar teori yang nantinya memberikan hasil optimal. Dalam kerangka berpikir ini peneliti akan menjelaskan objek penelitian dan objek permasalahan mengenai Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung.

Dari kerangka berpikir di atas, peneliti dalam penelitian Implementasi Kebijakan Dalam Keterbukaan Informasi Publik Di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung yang diharapkan berjalan sebagaimana mestinya dalam pelaksanaannya. Maka dari itu peneliti meneliti implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik.

Penelitian ini di dasari atas landasan dari teori yang dipilih dan digunakan adalah indikator implementasi kebijakan yang dijelaskan oleh **George C. Edward III (1980)** dalam **Agustino (2020:154)** menamakan model implementasi kebijakan publik dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Implementation* (dampak langsung dan tidak langsung terhadap implementasi).

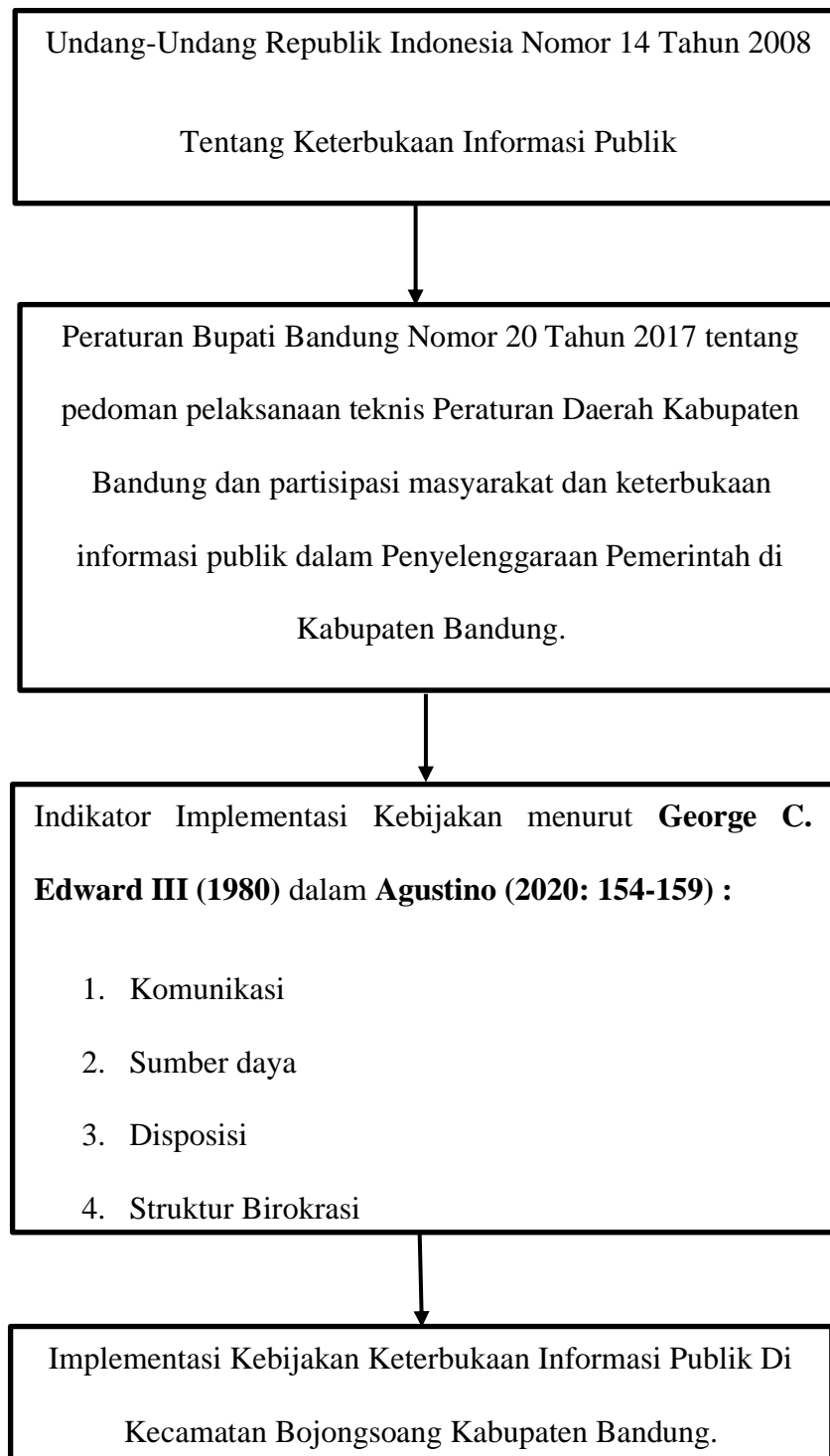
Dalam pendekatan yang dinyatakannya terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan di antaranya :

1. Komunikasi : variabel ini menentukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.
2. Sumber Daya : variabel kedua ini mempengaruhi efektif dan efisien daripada implementasi kebijakan publik. Kekurangan dan tidaknya sumber daya baik personal, kewenangan, keuangan, dan peralatan akan menyulitkan pada sebuah implementasi.
3. Disposisi : variabel ketiga ini jika pelaksana suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi penyimpangan.
4. Struktur Birokrasi : variabel terakhir ini menyangkut kepada kerja sama banyak orang, birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi yang baik.



Gambar 2. 1 Model Implementasi Kebijakan Edward III

Sumber : Agustino (2020:159)



Gambar 2. 2 Kerangka Berpikir

Sumber : Hasil Olahan Peneliti Tahun 2023

2.3 Proposisi

Proposisi merupakan dugaan sementara dari sebuah penelitian terhadap kondisi yang terjadi. Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan. Maka dari itu peneliti mengajukan proposisi sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung masih belum optimal.
2. Implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung masih belum optimal. Dan apabila ingin optimal harus memperhatikan indikator sebagai berikut yang di antaranya adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi.